

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**HYBRIDISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI
PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA BENGKULU**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ASROFI

NIM. 530049637

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2025

ABSTRACT
**HYBRIDIZATION IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC LAND
INFORMATION SERVICE POLICY**
(Case Study of Land Public Services in Bengkulu City)

Asrofi
(mpk.its05@gmail.com)
Graduate Study Program
Indonesia Open University

Digital transformation in public services in Indonesia continues to be accelerated to improve bureaucratic efficiency and transparency. One strategic implementation is the electronic land services policy launched by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency.

This study aims to analyze the implementation of electronic land service policies in Bengkulu City, with a focus on the hybridization phenomenon as a form of local adaptation to the national digital system.

This research uses a descriptive qualitative approach based on field studies, using the Van Meter and Van Horn policy implementation theoretical framework. Data were obtained through participant observation, semi-structured interviews, and documentation analysis, which were analyzed using NVivo 12 Plus software.

The results of the study indicate that policy implementation is partial and occurs in a hybrid format, where digital and manual procedures coexist. The main factors contributing to hybridization include limited technological infrastructure, resistance from implementing agencies, and low digital literacy among the public. Furthermore, suboptimal inter-agency communication and minimal technical training contribute to this hybrid practice. These findings emphasize that hybridization is not a failure, but rather an adaptive solution to complex local realities. This research contributes to the development of policy implementation theory in the regional context and encourages the formulation of more contextual and inclusive digital public service strategies.

Keywords: hybridization, implementation, electronic land information services

ABSTRAK
HYBRIDISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI
PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Layanan Publik Pertanahan di Kota Bengkulu)

Asrofi
(mpk.its05@gmail.com)
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka Indonesia

Transformasi digital dalam layanan publik di Indonesia terus digencarkan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi pelayanan. Salah satu implementasi strategisnya adalah kebijakan layanan pertanahan elektronik yang diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan layanan pertanahan elektronik di Kota Bengkulu, dengan fokus pada fenomena hybridisasi sebagai bentuk adaptasi lokal terhadap sistem digital nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan, dengan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara semi-struktur, dan analisis dokumentasi, yang dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bersifat parsial dan berlangsung dalam format hybrid, di mana prosedur digital dan manual berjalan berdampingan. Faktor penyebab utama hybridisasi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi agen pelaksana, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, komunikasi antarinstansi yang tidak optimal dan minimnya pelatihan teknis turut memperkuat praktik hibrida ini. Temuan ini menegaskan bahwa hybridisasi bukan bentuk kegagalan, tetapi solusi adaptif terhadap realitas lokal yang kompleks. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks daerah serta mendorong perumusan strategi pelayanan publik digital yang lebih kontekstual dan inklusif.

Kata Kunci: hybridisasi, implementasi, layanan informasi, pertanahan, elektronik

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI
PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Hybridisasi Implementasi Kebijakan Layanan Informasi

Pertanahan Secara Elektronik Di Kota Bengkulu

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Bengkulu , 02 September 2025

Yang Menyatakan



(Asrofi)
NIM 530049637

UNIVERITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Asrofi
NIM : 530049637
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TA PM : HYBRIDISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA
ELEKTRONIK DI KOTA BENGKULU

TAPM telah dipertahankan di hadapa Panitia Penguji Tugas Akhir Program
Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program
Pascasarjana Universitas Terbuka

Pada :
Hari/Tanggal : Selasa/ 07 Oktober 2025
Waktu : 13.00 – 14.30 WIB

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama: Anton Robiansyah, S.E., M.Ak.

Penguji Ahli

Nama: Prof. Dr. Mansyur Achmad,
M.Si.

Pembimbing I

Nama: Dr. Hj. Rulinawaty, S.Sos., M.Si.

Pembimbing II

Nama: Prof. Dr. Yumiati, M.Si

Tandatangan

.....
.....
.....
.....
.....

**PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG**

Judul TAPM : HYBRIDISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA
ELEKTRONIK DI KOTA BENGKULU

Penyusun TAPM : Asrofi

NIM : 530049637

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Selasa/ 07 Oktober 2025

Menyetujui :

Pembimbing II,



Prof. Dr. Yumiati, M.Si.

NIP.196507311991032001

Pembimbing I



Dr. Hj. Rulinawaty, S.Sos., M.Si.

NIP.197803242001122002

Mengetahui,

Ketua

Program Studi Magister Administrasi
Publik,

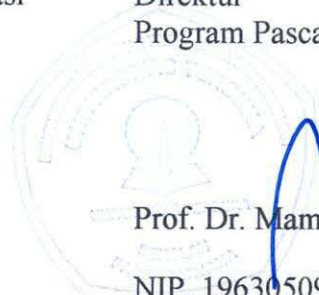


Dr. Siti Aisyah, M.Si

NIP. 19680612 199903 2 001

Direktur

Program Pascasarjana,



Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si

NIP. 196305091989031002

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa

Nama/NIM : Asrofi/ 530049637

Judul TAPM : Hybridisasi Implementasi Kebijakan Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik Di Kota Bengkulu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai sekitar 90% sehingga dinyatakan sudah layak uji untuk Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pembimbing II



Dr. Yumiati, M.Si
NIP. 196507311991032001

Pembimbing I



Dr. Hj Rulimawaty, S.Sos, M.Si
NIP. 197803242001122002

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Asrofi
NIM : 530049637
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TA PM : HYBRIDISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA
ELEKTRONIK DI KOTA BENGKULU

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program
Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program
Pascasarjana Universitas Terbuka

Pada :
Hari/Tanggal : Selasa/ 07 Oktober 2025
Waktu : 13.00 – 14.30 WIB

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji	Tandatangan
Nama: Anton Robiansyah, S.E., M.Ak.	
Penguji Ahli	
Nama: Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si.	
Pembimbing I	
Nama: Dr. Hj. Rulinawaty, S.Sos., M.Si.	
Pembimbing II	
Nama: Prof. Dr. Yumiati, M.Si	

**PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG**

Judul TAPM : HYBRIDISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA
ELEKTRONIK DI KOTA BENGKULU

Penyusun TAPM : Asrofi

NIM : 530049637

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Selasa/ 07 Oktober 2025

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I

Prof. Dr. Yumiati, M.Si.

Dr. Hj. Rulinawaty, S.Sos., M.Si.

NIP.196507311991032001

NIP.197803242001122002

Mengetahui,

Ketua

Program Studi Magister Administrasi
Publik,

Direktur

Program Pascasarjana,

Dr. Siti Aisyah, M.Si

Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si

NIP. 19680612 199903 2 001

NIP. 196305091989031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan islam melalui nabi pembimbing umat Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah segala puji bagi Allah akhirnya penulisan Tugas Akhir Penulisan Makalah (TAPM) sebagai syarat kelulusan program pasca sarjana di Universitas Terbuka berhasil diselesaikan. Secara khusus penulis menghaturkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Rulinawaty, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing 1 yang telah membantu penulis dan memberikan arahan terhadap penyusunan TAPM,
2. Ibu Prof. Dr. Yumiati, M.Si selaku pembimbing 2 yang dengan sabar memberikan arahan dan selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan TAPM,
3. Bapak Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si. selaku penguji ahli yang telah membantu penulis menyempurnakan penulisan TAPM,
4. Keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa agar penulis dapat segera menyelesaikan studi program pasca sarjana di Universitas Terbuka,
5. Semua pihak yang terlibat baik yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhirnya dengan selesainya penulisan Tugas Akhir Penulisan Makalah (TAPM) dengan judul Hybridisasi Implementasi Kebijakan Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik Di Kota Bengkulu, penulis berharap tulisan ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritik maupun praktik dalam kegiatan layanan pertanahan secara umum menjadi lebih baik.

Bengkulu, 20 Oktober 2025



Asrofi

NIM . 530049637

DAFTAR PUSTAKA

- Abdou, A. M., (2021). Good Governance And COVID-19: The Digital Bureaucracy To Response The Pandemic (Singapore As A Model), *Journal Of Public Affairs*, 21(4), 1-10.
- Adinegoro, K. R. R. (2023) Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. *Jurnal Administrasi Publik Volume XIX (1) 2023*: 26-49
- Adam, A. G. (2023). Systematic review of the changing land to people relationship and co-evolution of land administration. *Heliyon*, 9(10), e20637. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20637>
- Afdila, M. Adnan, Fachri (2022). Digitalisasi Administrasi Publik Sebagai Salah Satu Perwujudan Reformasi Birokrasi *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi VOL. 2 , NO 2, 2022 Hlm 27-32*
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chipashvili, A. (2022). Basic Principles of Land Administration. *Economics*, 105(1–2), 75–84. <https://doi.org/10.36962/ECS105/1-2/2022-75>
- Badan Pertanahan Nasional (BPN). 2011. *Pembangunan Basis Data Pertanahan yang Terintegrasi untuk Mendukung Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional*. Jakarta, Indonesia
- Bandur, Agustinus. (2016). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, Dan Teknik Analisis Data Dengan Nvivo 11 Plus*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Bandur, A. (2019). *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Bell, K. C. (2007). Good governance in land administration. *FIG Working Week*.
- Beriliai, Lintang, Antoro, A.F.S (2023). Implementasi Kebijakan Publik Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Atas Pengecekan Sertifikat Tanah Berbasis *Online Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Volume 3, Nomor 2, November 2023 (76-86)*
- Boyalı, H. (2023). Kamuya Değer Katma Bağlamında Yeni Kamu Yönetiminde İnovasyon: Dijital Yönetişim, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 25(44), 539-555.
- Brown, T. (2008). Design Thinking, *Harvard Business Review*, 86(6), 1-10.
- Burns, T., & Dalrymple, K. (2008). Conceptual Framework for Governance in Land Administration. *FIG Working Week 2008, August*.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The public administration dictionary*. Santa Barbara: ABC-Clío
- Christine, Daymon., dan Holloway, Immy (2008). *Metode-metode Riset Kualitatif: dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Penerbit Bentang
- Denzin, Norman K. & Yvonna S Lincoln. 1994. "Introduction Entering the Field of Qualitative Research" dalam *Handbook of Qualitative Research*, pp 1-17. Thousand Oaks, CA : SAGE
- Djaali dan Pudji Muljono, 2008. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo)

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, Londong England
- Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Public Policy*. Eleventh Edition, New Jersey: Perason Prentice Hal.
- Enemark, S., Williamson, I., & Wallace, J. (2005). Building modern land administration systems in developed economies. *Journal of Spatial Science*, 50(2), 51–68. <https://doi.org/10.1080/14498596.2005.9635049>
- Eryılmaz, B. (2019). *Kamu Yönetimi Düşünceler Yapılar Fonksiyonlar Politikalar*, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitrianingsih, Riyadi, Rakmat, Suharno (2021) Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan Dan Peta Bidang Tanah Terintegrasi Menuju Pelayanan Online. *Jurnal Tunas Agraria* Vol. 4 No.1
- Gatundu, C., Sambakhe, Z., & Jatta, F. (2019). Assessing Implementation of the Voluntary Guidelines on the Governance of Tenure: A Toolkit Approach: Lessons generated from ActionAid's work with governments and communities. *African Journal on Land Policy and Geospatial Sciences*, 2(1), 19–29
- Germa Bel, T. B. and M. E. W. K. (2014). *Mixed and hybrid models of public service delivery*. 112.
- Grindle, M. S. (1980). One. Policy Content and Context in Implementation. In *Politics and Policy Implementation in the Third World* (pp. 3–34). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400886081-005>
- Goggin, Malcolm L et al. 1990. *Implementation, Theory and Practice: Toward a Thid Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grover, R., Törhönen, M. P., Palmer, D., & Munro-Faure, P. (2007). Good governance in land administration and land tenure. *Land Reform, Land Settlement and Cooperatives*, 2, 6–17. <http://www.fao.org/sd/ltldirect/landrf.htm>
- Hartono, Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis* Edisi 6. Yogyakarta: BPFE.
- Henry, Nicholas. (1995). *Public Administration and Public Affairs (Sixth Edition)*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Huda, N., Wandebori, H. (2021). Problematika Transformasi Sertipikasi Tanah Digital. Marcapada: *Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 17-28
- Ismaya, S. (2013). *Hukum Administrasi Pertanahan*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Kamilah, A., & Yulianah, Y. (2018). Land Tenure System Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kedudukannya Dalam Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 785–805. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.31>
- Keban, T. Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)*, Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Kimbal, Rahel Widiawati. 2015. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

- Leão, A. T. H., & Canedo, E. D. (2018). Best Practices And Methodologies To Promote The Digitization Of Public Services Citizen-Driven: A Systematic Literature Review. *Information*, 9(8), 1-19.
- Lemmen, C., Enemark, S., & McLaren, R. (2016). Building Fit-For-Purpose Land Administration Systems: Providing Security of Tenure for All. *FIG Working Week 2016: Recovery from Disaster2*, 2-6 May 2016.
- Linder, S.H. and Peters, B.G. (1989), Instruments of government: perceptions and contexts, *Journal of Public Policy*, 9(1): 35 ± 58.
- Mansberger, R., Navratil, G., Muggenhuber, G., & Twaroch, C. (2012). Is good governance in land administration measurable and comparable? *Bodenkultur*, 63(1), 27–34
- Marryanti, S. and Nurrokhman, A. (2019) Kesiapan Data Pertanahan Menuju Pelayanan Online, Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia Menuju Modern, Digital , dan Terpercaya
- Mazmanian, D.H., and Sabatier, P.A., 1986, *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- McCurdy, Howard E (1986). *Public Administration: a Bibliographic Guide to the Literature*
Volume 29 of Public administration and public policy, Dekker
- McLaren, R., Lemmen, C., & Enemark, S. (2016). Building Fit-For-Purpose Land Administration Systems: Guiding Principles. *FIG Working Week: Recovery from Disaster*, 8323.
- Munawaruzaman, A. (2020). Implementation of Digital Transformation of the Ministry of Agraria To Improve Public Services. *Prosding Seminar Nasional*, 1(1), 589–598.
- Mülazımoğlu, M. E., Günal, C. N. (2023). Post Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı Işığında Çin Kamu Yönetimi Reformları”, *Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi*, 9(1), 1-14.
- Nugroho, D, Riant. 2012. *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Nurrokhman, A., & Suprastyo, D. (2019). Validitas Survei Kepuasan Masyarakat Online Terhadap Pelayanan Pertanahan Tahun 2018. *Jurnal Pertanahan*, 9(2), 73–89. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/xytd2>
- Ozan, M. S., Yolcu, F. S. (2021). Geleneksel Ve Yeni Kamu Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme, 4th International European Conference On Interdisciplinary Scientific Research, August 8-9, 2021/ Warsaw, Poland, 582-583.
- O'Neill, M. (2013). The NVivo™ Toolkit: How to apply NVivo™ in your PhD for research and publishing success. Melbourne, Australia: QSR
- Panday, U. S., Chhatkuli, R. R., Joshi, J. R., Deuja, J., Antonio, D., & Enemark, S. (2021). Securing land rights for all through fit-for-purpose land administration approach: The case of Nepal. *Land*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/land10070744>
- Petrakovska, O., & Mykhalova, M. (2022). Management and Administration of Land Resources. *Spatial Development*, 2. <https://doi.org/10.32347/2786-7269.2022.2.258-264>
- Pieterse, J. N. (1993). Globalization As Hybridization, ISS Working Paper Series/General Series, 152, 1-18.

- Poerwandari, E. K. 1998. Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Ramli, Razlini Mohd (2012) Hybrid Approach of e-Government on Malaysian e-Government Experience. *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 2, No. 5, September 2012
- Reza, Muhammad, Rosadi, Otong (2023). Penerapan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Dalam Kegiatan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan). *UNES Law Review* Volume 5, Issue 4, Juni 2023
- Ripley, Randall B dan Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, Chicago: The Dorsey Press.
- Rosenbloom, David H (2005) *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*: Published in 2005 by McGraw-Hill, this book is about the management, politics, and law of the public sector
- Rowe, W., Scheffing V. (1991). *Memory And Modernity: Popular Culture In Latin America*, Verso, London
- Rulinawaty, Andriyansah, Alwi, Mutmainnah, B., & Mawardi. (2021). *Hibridisasi Pelayanan Publik: Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sabatier, Paul. 1986, 'Top down and Botton up Approaches to Implementation research' *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h.21-48
- Salsabil, H. H. (2023). Akibat Hukum Layanan Pengecekan Sertipikat Tanah Secara Elektronik Bagi PPAT (Studi Kasus di Kabupaten Semarang). *Repository.Unissula.Ac.Id*, 1. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26577>
- Şen, A. T. (2024). From Traditional Public Administration To Digital Hybrid Public Administration *Quantrade Journal of Complex Systems in Social Sciences*, 6 (1) , 81-93. Doi: 10.5281/zenodo.11408035
- Soetanto, R., Hermawan, F., Milne, A., Hatmoko, J. U. D., As'ad, S., He, C. (2020). Developing Sustainable Arrangements For "Proactive" Disaster Risk Financing In Java, Indonesia, *International Journal Of Disaster Resilience In The Built Environment*, 11(3), 435-451
- Suartining, N. K., & Djaja, B. (2023). Land Rights in the Land Law System in Indonesia According to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960. *Journal of Social Research*, 2(6). <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.903>
- Sunarno, S. (2015). Incorporating Good Land Governance in the Disaster Region of Yogyakarta. *Jurnal Media Hukum*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0044.1-16>
- Supadno (2025). Good Governance Dalam Administrasi Pertanahan: Studi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Elektronik. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. *JDG Vol. 14 No. 04 (2025)* 15-27
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2016. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*, 7th Edition. New Jersey: Wiley

- Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D.A. (2021). „Kualitas data pertanahan menuju pelayanan sertifikat tanah elektronik
- Sønderskov, M., Rønning, R., & Magnussen, S. (2022). Hybrid stimulations and perversions in public service innovation. *Public Policy and Administration*, 37(3), 363–384. <https://doi.org/10.1177/09520767211015015>
- Sørensen, E., Torfing, J. (2021). Accountable Government Through Collaborative Governance?, *Administrative Sciences*, 11(4), 127-137
- Sofjan Aripin, and Rulinawaty Rulinawaty, (2022), “Hybrid Government: Mixed and Hybrid Models of Public Service Delivery in Disadvantaged, Foremost and Outermost Regions” in *The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS)*, KnE Social Sciences, pages 1109–1123. DOI 10.18502/kss.v7i9.11001
- Syafitri, Ezy, Yogopriyatn, Jatmiko, Aziz, Abdul Zuhakim (2024). Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu. IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1053>
- Thanh, N. H. (2021). Digital Transformation: Smart Strategy in Administrative Reform in Vietnam. *HighTech and Innovation Journal*, 2(4), 328–345. <https://doi.org/10.28991/hij-2021-02-04-06>
- Udoji, Chief J.O, 1981. The African Public Servant As Public Policy in Africa, Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management
- Van Meter D.S, V. H. C. . (1975). The Policy Implementation Process A Conceptual Framework. *Journals.Sagepub.Com*, 6.
- Virant, G. (2009). Javna Uprava [Public Administration], Faculty Of Administration, Ljubljana.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahid, M. L. (2024). Efektivitas Layanan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Secara Elektronik Dalam Membantu Kinerja Ppat Melakukan Tugas Jabatannya. *Repository.Unissula.Ac.Id*, 4. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33007>
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). The Nine Elements of Digital Transformation Opinion & Analysis. *MIT Sloan Management Review*, 55(3), 1–6.
- Wibowati, J., & Octarinie, N. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pt Muarakati Baru Satu Palembang. *Jurnal Manajemen*, 8(2), 15-31
- Wicaksono, Arditya Purbawa, Yudha, Nugroho, Romi (2021). Transformasi Pelayanan Pertanahan Di Indonesia (Konsep, Ide, Dan Tantangan Layanan Digital). Puslitbang ATR/BPN PRESS
- Winarsih, S. (2023) „Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar“, 14(1), pp. 147–169.
- Wiriani, W. (2024). Positive Impact of Administrative Modernization in Land in Indonesia. *International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education*, 03(06).

- Zamawe, F. C. (2015). The implication of using NVivo software in qualitative data analysis: Evidence-based reflections. *Malawi Medical Journal*, 27(1), 13– 15. <https://doi.org/10.4314/mmj.v27i1.4>
- _____ Peraturan Menteri ATR/BPN No 19 Tahun 2020
- _____ Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 2017